

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH “KOSPIN SYARIAH KARANGANYAR”

Suselo Winasis Apriyani^{1*}, Kartika Hendra Titisari², Trimurti³

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. KH. Agus Salim No.10, Surakarta

*Email: ninapriyani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) prosedur pembiayaan, (2) penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan, dan (3) efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan pada KSPPS Kospin Syariah Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. menggambarkan dengan cara membandingkan empat unsur berdasarkan teori Mulyadi sesuai normatif dan faktualnya di KSPPS Kospin Syariah dengan teori-teori sehingga dapat memecahkan masalah dan menarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pembiayaan dimulai dari pengajuan pembiayaan; proses pembiayaan; dan keputusan pembiayaan; (2) penerapan sistem pengendalian intern terdiri dari struktur organisasi yang menjelaskan tugas dan wewenang setiap jabatan; wewenang dan prosedur pencatatan dilakukan oleh bagian-bagian yang terkait dan otorisasi; praktek yang sehat; karyawan yang mutunya sesuai tanggungjawab (3) presentase unsur-unsur sistem pengendalian intern adalah 66,7% artinya penerapan sistem pengendalian intern cukup efektif dalam menunjang prosedur pemberian pembiayaan.

Kata kunci: Koperasi Syariah, Pembiayaan Syariah, Sistem Pengendalian Intern,

1. PENDAHULUAN

Dalam koperasi simpan pinjam yang berbasis Syariah, proses peminjaman lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 12 pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yang dilaksanakan KSPPS Kospin Syariah Karanganyar merupakan aset besar bagi koperasi itu sendiri oleh sebab itu dalam operasionalnya harus dilakukan pengawasan yang sesuai dengan prosedur dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Dalam pembiayaan terdapat suatu tingkat resiko tertentu. Salah satu dampak pemberian pembiayaan adalah pengunduran tempo pembayaran angsuran dari debitur atau pembiayaan macet.

Pengendalian internal menurut Salim (2015) adalah suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait ditetapkan oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan keandalan catatan akuntansi. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi dimana keduanya mempunyai peran penting dalam operasional perusahaan dan berkaitan erat.

Pembiayaan memberikan dampak adanya penangguhan penerimaan uang, baru pada saat jatuh temponya terjadi aliran kas masuk. Penangguhan penerimaan uang tersebut akan memberikan pengaruh yang kurang baik, apabila pemberian pembiayaan yang dilakukan terlalu besar akan terjadi penimbunan modal kerja dalam aktiva lancar pembiayaan yang diberikan. Pengendalian intern pembiayaan mutlak harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan macet. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan piutang yang baik yaitu dalam bentuk kebijaksanaan pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian intern piutang, agar dana yang terdapat dari para debitur dapat tertagih tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. (Iskandar, 2012). Begitu pula dalam operasional KSPPS Kospin Syariah Karanganyar yang fokus usahanya adalah pembiayaan syariah. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan sesuai yang dibutuhkan sangatlah penting, agar terhindar dari

pembiayaan macet yang dapat merugikan koperasi. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin membahas lebih mendalam mengenai : **“Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kospin Syariah Karanganyar.”**

2. METODOLOGI

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan peristiwa, keadaan, kegiatan suatu entitas perusahaan. Penelitian kualitatif karena penelitian yang data-datanya dapat diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi bukan melalui prosedur statistik atau perhitungan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan uraian yang lebih mendalam tentang Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan dalam KSPPS Kospin Syariah Karanganyar.

2.2. Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2015 : 63) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis variable yaitu :

- Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern yang terdiri dari unsur-unsur struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawabnya.
- Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas.

2.3. Populasi dan Sampling

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh KSPPS Kospin Syariah di Provinsi Jawa Tengah. Sampel penelitian ini adalah KSPPS Kospin Syariah Karanganyar. Sedangkan sampling atau cara pengambilan sample dilakukan dengan *purposive* yaitu teknik pengambilan sample dengan memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian. Sugiono (2015) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti. Nasution (1988) menyatakan alasan manusia dijadikan intrumen dalam penellitian kualitatif ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk pasti. Sehingga dapat dijelaskan bahwa instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang kemudian dibantu dengan cara observasi dan wawancara.

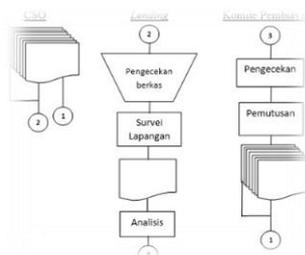
2.5. Metode Pengumpulan Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu, metode yang menggambarkan dengan cara perbandingan 4 unsur sistem pengendalian intern menurut teori Mulyadi sesuai normatif dengan faktualnya di KSPPS Kospin Syariah Karanganyar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pembiayaan Di KSPPS Kospin Syariah Karanganya

Secaara skematis slur proses pengajuannya adalah :



Gambar 1. Prosedur Pembiayaan

Seperti penjelasan dalam Syahputra (2014), tahapan proses pembiayaan ada 5 yaitu, persiapan pembiayaan, analisis atau penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pelaksanaan dan administrasi pembiayaan dan pengawasan atau pengendalian pembiayaan dan pembinaan debitur. Berikut penjelasan dari setiap tahap prosedur pembiayaan di KSPPS Kospin Syariah :

1. Pengajuan Pembiayaan di bagian *customer service officer*, dengan syarat-syarat berikut:
 - a. Bersedia menjadi anggota dari KSPPS Kospin Syariah.
 - b. Bersedia untuk mengangsur pembiayaan tepat waktu.
 - c. Pengajuan dilakukan oleh anggota atau calon anggota secara langsung atas nama sendiri.
 - d. Bersedia disurvei dan memberikan data yang sebenarnya.
 - e. Melengkapi administrasi pendaftaran meliputi: foto copy KTP Suami-Istri, copy Kartu Keluarga (KK), foto copy surat nikah, foto copy rekening listrik terakhir, foto copy slip gaji terakhir
 - f. Kospin syariah hanya menerima jaminan dalam sertifikat tanah dan BPKB kendaraan.
 - g. Mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan.
2. Proses Pembiayaan

Setelah persyaratan administrasi calon nasabah diserahkan pada *Customer Service Office*, berkas tersebut akan diberikan kepada bagian *Lending Officer* untuk dilakukan pengecekan berkas, dilakukan survei lapangan untuk mengetahui keadaan calon nasabah yang sebenarnya dan menganalisa hasil survei. Semua data yang diisi nasabah akan dibandingkan dengan hasil laporan survei, menimbang dan menganalisa lebih dalam apakah calon nasabah akan disetujui sesuai besar pengajuannya, kurang dari jumlah pengajuannya atau bahkan ditolak. Hasil rekomendasi *Lending Officer* pembiayaan akan diteruskan pada bagian komite pembiayaan. Penilaian pembiayaan oleh koperasi dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions* (Kasmir, 2008).

3. Keputusan Pembiayaan

Apabila hasil survei dan analisis baik maka komite pembiayaan akan menyetujui dan dilaksanakan proses pencairan pembiayaan. Begitu pula sebaliknya, apabila hasil survei dan analisis tidak baik maka pengajuan pembiayaan akan ditolak. Untuk hasil keputusan yang ditolak, komite pembiayaan akan memberikan surat penolakan. Bersama berkas, surat penolakan akan diserahkan ke *Customer Service Office* untuk selanjutnya akan diberikan ke nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan yang diterima, sebelum dana dicairkan komite pembiayaan membuat surat perjanjian pembiayaan dan kuasa menjual. Kemudian dilakukan akad pembiayaan.

3.2. Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Yang Diterapkan KSPPS “Kospin Syariah”

Karanganyar

Mengacu pada teori normatif, maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian intern pembiayaan KSPPS Kospin Syariah dapat dilihat dari unsur-unsur :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas

KSPPS Kospin Syariah telah menjelaskan struktur organisasi dan ditulis lengkap dalam AD/ART tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap jabatan. Jaminan yang diajukan nasabah haruslah melalui penilaian jasa appraisal, sehingga akan diketahui nilai yang akurat dari agunan tersebut. Begitu pula yang dijalankan Kospin Syariah, penilaian jaminan dilakukan oleh pihak penilai independen tetapi, tidak semua agunan dilakukan penilaian oleh penilai independen. Sebagian agunan yang dirasa mampu Kospin Syariah melakukan penilaian sendiri.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan

Prosedur pencatatan yang dilakukan Kospin Syariah telah berjalan dengan baik. Setiap transaksi baik transaksi untuk produk koperasi atau untuk operasional telah dicatat oleh bagian pembiayaan dan keuangan. Pencatatan yang dilakukan berdasar pada dokumen. Pencatatan yang dilakukan juga sudah menggunakan komputerisasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Tetapi, dalam hal ini peneliti tidak dapat melakukan pengambilan sample berkas pembiayaan yang diotorisasi komite pembiayaan.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Salah satu cara untuk menjalankan praktek yang sehat adalah penggunaan formulir permohonan bernomor urut. Formulir pengajuan pembiayaan Kospin Syariah telah terdapat kolom nomor, namun tidak diisi oleh petugas.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab

Kospin Syariah juga memberikan pendidikan tambahan kepada karyawannya berupa pelatihan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk semua karyawan dan khusus untuk bagian marketing dilakukan setiap 6 bulan sekali. Hal ini perlu dilakukan untuk mengupgrade diri mereka, agar performa dalam bekerja lebih baik. Kospin Syariah melakukan evaluasi karyawan khususnya pada bagian marketing setiap 3 bulan sekali.

3.3. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan KSPPS Kospin Syariah Karanganyar

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan KSPPS Kospin Syariah Karanganyar Dibandingkan Dengan Unsur-Unsur SPI Menurut Mulyadi

Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan

Unsur SPI Pembiayaan	Teori Acuan	Penerapan Pembiayaan di KSPPS Kospin Syariah Karanganyar	Kesimpulan
	struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab	koperasi memiliki struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab	Sesuai
Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional	fungsi pengecekan berkas pembiayaan terpisah dengan fungsi survei	pengecekan berkas dilakukan juga oleh petugas survei	Tidak Sesuai
	penilaian jaminan dilakukan oleh pihak independen	tidak semua penilaian dilakukan oleh jasa appraisal	Tidak Sesuai
	pembiayaan dilaksanakan oleh fungsi pengecekan berkas fungsi survey dan fungsi analisis pembiayaan	pembiayaan dilakukan bagian pengecekan berkas, survey dan analisis tetapi bagian pengecekan dan survey dilakukan satu orang	Tidak Sesuai
Unsur SPI Pembiayaan	Teori Acuan	Penerapan Pembiayaan di KSPPS Kospin Syariah Karanganyar	Kesimpulan
	setiap pengeluaran harus dicatat ke dalam catatan akuntansi	selalu ada pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi keluar	Sesuai
Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan dan biaya	pencatatan kedalam catatan akuntansi dilakukan oleh bagian yang diberi wewenang	pencatatan dilakukan oleh petugas administrasi	Sesuai
	pencatatan kedalam catatan akuntansi didasari oleh dokumen	setiap pencatatan transaksi selalu didasari oleh dokumen sumber dan dokumen pendukung lainnya	Sesuai
	laporan survei dan analisis pembiayaan diotorisasi oleh kepala unit	laporan survei dan analisis pembiayaan ditanda tangani oleh manager pembiayaan	Tidak Sesuai
	realisasi pembiayaan dilakukan oleh bagian customer service dan teller	pencairan pembiayaan dilakukan dibagian customer service dan teller	Sesuai

Unsur SPI Pembiayaan	Teori Acuan	Penerapan Pembiayaan di KSPPS Kospin Syariah Karanganyar	Kesimpulan
Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi	penggunaan formulir permohonan pembiayaan bernomor urut	formulir permohonan pembiayaan mempunyai kolom nomor urut namun tidak diisi oleh petugas	Tidak Sesuai
	pemeriksaan mendadak kepada debitur	petugas survei rutin melakukan pemeriksaan mendadak ke lokasi usaha debitur tanpa pemberitahuan sebelumnya	Sesuai
	perputaran jabatan	perputaran jabatan dilakukan baik pada kantor pusat, cabang dan cabang pembantu	Sesuai
	pemeriksaan otorisasi untuk pengecekan sistem pengendalian intern	tidak adanya sampling otorisasi	Tidak Sesuai
	pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur unsur pengendalian internal yang lain	Kospin Syariah memiliki tim SPI yang bertugas mengecek efektivitas unsur-unsur SPI	Sesuai
Unsur SPI Pembiayaan	Teori Acuan	Penerapan Pembiayaan di KSPPS Kospin Syariah Karanganyar	Kesimpulan
Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya	latar belakang pendidikan mendukung pekerjaannya	Kospin Syariah selalu melihat latar belakang pendidikan calon karyawan demi pekerjaan yang dihasilkan	Sesuai
	seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya	Kospin Syariah selalu melakukan seleksi calon karyawan dari wawancara dan tes tertulis	Sesuai
	pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya	pelatihan-pelatihan selalu diadakan untuk meningkatkan kuitas pekerjaan	Sesuai
	terdapat evaluasi secara periodik berdasarkan pekerjaan karyawan	evaluasi rutin dilakukan, karyawan yang kinerjanya menurun akan diberi sanksi	Sesuai

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil evaluasi sistem pengendalian intern pembiayaan di KSPPS “Kospin Syariah” Karanganyar diatas, didapat jumlah yang sesuai adalah 12 dan yang tidak sesuai sebanyak 6 dari 18 dasar teori yang dikemukakan Mulyadi. Dengan demikian dapat dihitung persentasenya sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Persentase unsur-unsur SPI} &= \frac{\text{Jumlah kesimpulan “sesuai”}}{\text{Jumlah kesimpulan}} \times 100\% \\ \text{Persentase unsur-unsur SPI} &= \frac{12}{18} \times 100\% \\ &= 66,7\% \end{aligned}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian pembiayaan “cukup efektif” yaitu sebesar 66,7.

Realisasi Pembiayaan KSPPS Kospin Syariah Karanganyar

Tujuan dilaksanakannya sistem pengendalian intern pembiayaan adalah agar operasionalnya berjalan lancar, efektif dan efisien, serta mengurangi kesalahan-kesalahan data akuntansi. Salah satu dampak efektifnya sistem pengendalian intern pembiayaan adalah realisasi anggaran yang lancar dan menurunnya tingkat pembiayaan macet. Berikut data mengenai realisasi pembiayaan pada KSPPS Kospin Syariah tiga tahun terakhir data diperoleh.

Tabel 4.2 Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh KSPPS Kospin Syariah Karanganyar

Jenis Pembiayaan	2013	2014	2015
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Mudharabah	2.693.875.400	1.698.750.156	1.987.514.114
Murabahah	25.062.994.907	26.199.947.775	29.157.864.192
ODS	-	2.435.689.722	2.785.945.111
Qardhul Hasan	79.500.000	72.500.000	84.510.000
Jumlah	27.836.370.307	30.406.887.653	34.015.833.417

Sumber: Data KSPPS Kospin Syariah Karanganyar, 2015

Tabel 4.2 menggambarkan total pembiayaan yang disalurkan KSPPS Kospin Syariah kepada nasabah dari tahun 2013 – 2015. Jumlah total pembiayaan yang disalurkan tiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Minat nasabah dalam 3 tahun terakhir dalam pembelian barang untuk operasional lebih tinggi dibanding peminjaman modal dalam bentuk tunai. *One Day Service* yang dibuka mulai tahun 2014 dirasa mudah dan sangat membantu bagi nasabah, sehingga semakin banyak nasabah yang memilih pelayanan ini. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya tingkat pembiayaan *One Day Service* yang disalurkan Kospin pada tahun 2015. Sedangkan dana Qardhul Hasan atau kebajikan pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015. Dana ini merupakan dana sosial sehingga tidak berpengaruh besar pada kinerja koperasi.

Tabel 4.3 Pembiayaan KSPPS Kospin Syariah Karanganyar Berdasarkan Kualitas Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Lancar	26.722.915.495	29.370.534.393	33.023.083.365
Kurang Lancar	361.872.814	284.865.469	357.825.275
Diragukan	278.363.703	425.737.929	244.717.121
Macet	473.218.295	325.749.844	390.207.657
Jumlah	27.836.370.307	30.406.887.635	34.015.833.418

Sumber: Data KSPPS Kospin Syariah Karanganyar 2015

Tabel diatas menjelaskan jenis pembiayaan selamat 3 tahun terakhir. Pembiayaan lancar pada tahun 2013-2015 semakin meningkat yang artinya semakin banyak nasabah yang mentaati peraturan dengan membayar angsuran secara berkala tepat waktu.

Sedangkan kualitas pembiayaan kurang lancar yang artinya ada tunggakan pada angsuran pembiayaan (baik angsuran pokok atau bagi hasilnya) lebih dari 90 hari. Pada tabel 4.2 dapat dijelaskan kualitas pembiayaan kurang lancar dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan. Pembiayaan kurang lancar kebanyakan disebabkan usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan pendapatan.

Untuk kualitas pembiayaan diragukan mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 ke tahun 2015. Pembiayaan diragukan berarti ada angsuran yang tertunggak melampaui 180 hari. Kualitas pembiayaan macet berarti terdapat tunggakan angsuran yang melampaui 120 hari, dari data tabel diatas pada tahun 2013 ke tahun 2014 kualitas pembiayaan macet mengalami penurunan. Hal ini sangatlah baik bagi koperasi. Tetapi, pada tahun 2014 ke tahun 2015 pembiayaan macet mengalami peningkatan. Pembiayaan macet yang tinggi menyebabkan pendapatan yang diterima koperasi dapat berkurang. Sehingga, walaupun mengalami peningkatan yang tidak signifikan, pembiayaan macet haruslah diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari meningkatnya pembiayaan macet adalah menganalisis mengenai mengenai 5C yaitu : *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan, Prosedur pembiayaan dibagi ke dalam 3 proses yaitu, pengajuan pembiayaan, proses pembiayaan dan keputusan pembiayaan, Sistem pengendalian intern pembiayaan telah diterapkan dan mencakup 4 unsur yaitu struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab dan prosentase yang didapat dari perhitungan berdasarkan rumusan Champion sebesar 66,7% yang artinya penerapan pengendalian intern cukup efektif dalam menunjang prosedur pembiayaan.

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan. Dalam penelitian ini data yang diberikan terbatas sehingga tidak dapat dilakukan pengambilan sample dalam hal otorisasi pembiayaan.

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk peneliti selanjutnya adalah menggunakan objek penelitian koperasi lainnya yang dapat menyajikan data-data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanina, Ruzzana. 2011. *Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Majapahit Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Champion, D.J. 1990. *Basic Statistic For Social Research*. Second Ed. New York: Milan Publishing Co.

- Iskandar, David. 2012. Kontrol Intern Kredit. <https://belajarperbankanggratis.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-pengendalian-intern-kredit.html>. Diakses tanggal 14 Agustus 2016.
- Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi revisi 2008. PT. Raja Persada : Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4 Jakarta : Salemba Empat. Hal.129
- Nasution. 1998. Metodologi Penelitian Natuaralistic. Bandung : PN. Tarsito.
- Salim, F.A. 2015. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bukopin Manado. *Jurnal EMBA*. Vol (3):1. 1036.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Syahputra, Emir. 2014. Prosedur Pemberian Kredit. <http://emirsiregar58.blogspot.co.id/2014/02/prosedur-pemberiankredit-1a.html>. Diakses tanggal 28 Agustus 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat 12*